



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAL PRIMA YUDHA S.**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **422599**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.117.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 729 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 2.499 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 6.250 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 120.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.700.003
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.326.200.003
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.326.200.003

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.